

**OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
DANA DESA MELALUI PENDEKATAN EKONOMI  
SYARIAH: STUDI KASUS DI DESA HUTABARGOT  
SETIA MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh

MAR'IE MUHAMMAD

NIM. 21080025

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025**

**OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA  
MELALUI PENDEKATAN EKONOMI SYARIAH: STUDI KASUS DI DESA  
HUTABARGOT SETIA MANDAILING NATAL**



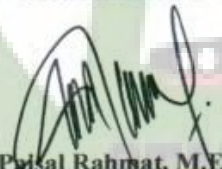
**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh

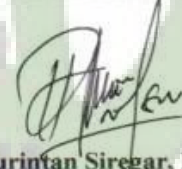
**Mar'ie Muhammad**  
**NIM. 21080025**

PEMBIMBING I



**Puwal Rahmat, M.E.**  
NIP. 199210022020121006

PEMBIMBING II



**Nurintan Siregar, M.E.**  
NIP. 198610212019032008

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'ie Muhammad  
Tempat, tanggal lahir : Hutabargot setia 20 Maret 1998  
NIM : 21080025  
Semester/T.A : IX (Senibilan)/2025  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Alamat : Hutabargot Setia Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul: **"Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa melalui Pendekatan Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal"**, adalah benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,




**Mar'ie Muhammad**  
NIM. 21080025

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

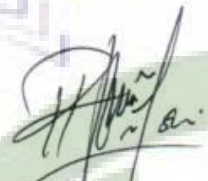
Pembimbing Skripsi atas nama Mar'ie Muhammad, NIM. 21080025 dengan judul: **“Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilita Dana Desa Melalui Pendekatan Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal”** memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I

  
Paisal Rahmat, M.E  
NIP. 199210022020121006

Panyabungan, Oktober 2025  
Pembimbing II

  
Nuriatun Siregar, M.E  
NIP. 198610212019032008

STAIN MADINA

### LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi a.n Mar'ie Muhammad NIM: 21080025, judul: "OPTIMALISASI TRANSFERANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA MELALUI PENDEKATAN EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DESA HUTABARGOT SETIA MANDAILING NATAL" telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Studi Ekonomi, Syariah STAIN Mandailing Natal yang dilaksanakan tanggal 07 Oktober 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Faisal Affandi, M.E.I NIP. 198310182019031006	Ketua Sidang/ Penguji I		14/10-2025
2	Drs. Hamonangan, M.Si NIP. 196507282003121001	Sekretaris Sidang/ Penguji II		14/10-2025
3	Paisal Rahmat, M.E NIP. 199210022020121006	Penguji III		14/10-2025
4	Nurintan Siregar, M.E NIP. 198610212019032008	Penguji IV		14/10/2025

Ujian Munaqasyah, 20 Oktober 2025  
Mengetahui,  
Ketua STAIN Mandailing Natal  
  
Prof. Dr. H. Suci Muliya Harahap, M.Ag  
NIP. 197203131997121002

## PERSEMBAHAN

### “MOTTO”

“Jatuh bangun bukan tanda kegagalan,  
tapi bukti bahwa aku terus berjuang untuk menemukan makna ilmu.”

(Mar'ie Muhammad Nasution)

### PUISI PERSEMBAHAN

#### “Jejak di Jalan Ilmu”

Di antara sepi malam dan cahaya redup lampu  
Kutulis mimpi di atas lembar waktu  
Setiap huruf adalah doa  
Setiap kalimat adalah langkah menuju ridha-Nya

Ilmu bukan sekedar pengetahuan  
Ia adalah cahaya yang menuntun hati  
Membuka tabir kebodohan  
dan menuntun insan kembali pada kebenaran

Kepada Ayah dan Ibu, sumber cinta yang tak bertepi  
yang mengajarkan arti sabar dalam diam  
dan makna ikhlas dalam pengorbanan

Kepada para guru dan pembimbingku  
yang menyalakan lentera ilmu digelap pikiranku  
Semoga setiap ajaran menjadi amal yang abadi

Dan kepada diriku sendiri  
yang pernah jatuh, rapuh, lalu bangkit  
Ingatlah, setiap perjuangan bukan untuk pujian  
Melainkan menjemput keberkahan dari Tuhan

Sebab ilmu sejati bukanlah milik merka yang pandai  
Melainkan milik mereka yang rendah hati  
di hadapan Sang Maha Mengetahui

Hutabargot Setia, 10-10-2025

Mar'ie Muhammad Nasution

## ABSTRAK

**Marie Muhammad (21080025). Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Melalui Pendekatan Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Huta Bargot Setia Mandailing Natal.** Penelitian ini akan bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Hutabargot Setia, Mandailing Natal, dan mengeksplorasi penerapan prinsip ekonomi syariah sebagai upaya optimalisasi pengelolaan dana desa. Metode dan pendekatan penelitiannya bersifat kualitatif fenomenologis, serta data-datanya diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara normatif, pemerintah desa di Desa Hutabargot Setia, telah melaksanakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi: *Pertama*, publikasi APBDes melalui baliho. *Kedua*, musyawarah desa. *Ketiga*, pelaporan kepada BPD dan juga pihak kecamatan. Namun demikian, bentuk transparansi dan akuntabilitas ini masih terbatas pada aspek administratif sehingga kurang menyentuh dimensi pemahaman warga masyarakat secara luas. Selanjutnya, Integrasi prinsip ekonomi syariah, seperti *amanah*, *shiddiq*, *tabligh*, *syura*, *al-'adl*, dan *mas'uliyah*, dapat mengoptimalkan transparansi/akuntabilitas yang sebelumnya bersifat administratif menjadi lebih substantif. Transparansi ini dapat dioptimalkan melalui penyajian informasi dengan bahasa yang sederhana, infografis, dan juga pemanfaatan media digital. Sedangkan akuntabilitas ini dapat dioptimalkan melalui konsep "*akuntabilitas moral etis syariah*" yang menekankan pertanggungjawaban tidak hanya kepada negara, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah Swt. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan ekonomi syariah dapat mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan juga memperkuat kepercayaan publik. Model integratif ini dapat menjadi alternatif kerangka pengelolaan Dana Desa yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berlandaskan nilai etika keagamaan.

**Kata Kunci:** *Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Ekonomi Syariah*

## ABSTRACT

**Mar'ie Muhammad (21080025). Optimizing Village Fund Transparency and Accountability through an Islamic Economic Approach: A Case Study of Hutabargot Setia Village, Mandailing Natal.** This study aims to analyze the transparency and accountability of Village Fund management in Hutabargot Setia Village, Mandailing Natal, and to explore the application of Islamic economic principles as an effort to optimize the management of village funds. The research employs a qualitative phenomenological approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation, which were then analyzed thematically. The findings reveal that, normatively, the village government of Huta Bargout Setia has implemented transparency and accountability mechanisms in accordance with existing regulations. These include: (1) the public disclosure of the Village Budget (APBDes) through billboards, (2) village deliberation meetings (*musyawarah desa*), and (3) reporting to the Village Consultative Body (BPD) and the sub-district authorities. However, such forms of transparency and accountability remain largely administrative, and thus fail to fully reach the broader dimension of community understanding. Furthermore, the integration of Islamic economic principles such as *amanah*, *shiddiq*, *tabligh*, *syura*, *al-'adl*, and *mas'uliyah*, can optimize transparency and accountability by transforming them from administrative to more substantive dimensions. Transparency can be enhanced through the use of simplified language, infographics, and digital media in presenting information. Meanwhile, accountability can be strengthened through the concept of "ethical-moral Islamic accountability," which emphasizes responsibility not only to the state but also to society and ultimately to Allah Swt. This study concludes that the Islamic economic approach can optimize Village Fund management while reinforcing public trust. The integrative model proposed in this research offers an alternative framework for Village Fund governance that is more equitable, participatory, and grounded in ethical and religious values.

**Keywords:** *Village Funds, Transparency, Accountability, Islamic Economics*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum, wr.wb*

Segala puji penulis sampaikan kepada Allah Swt, yang telah menjadikan langit dan juga bumi beserta isinya sebagai pertanda kebesaran-Nya dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. *Rabb* bagi seluruh makhluk baik yang berada di langit maupun di bumi, atas berkah nikmat dan rahmat-Nya. yang telah diberikan kepada setiap makhluk-Nya, khususnya kesehatan dan juga kesempatan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam marilah kita berikan kepada Rasulullah Saw, Nabi akhir zaman dan penutup para Nabi, yang telah mengajak umat manusia ini kepada jalan kebenaran, menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan ini sehingga mampu menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Mengingat akan perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1, maka karenanya penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa Melalui Pendekatan Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Huta Bargot Setia Mandailing Natal”. hal ini bertujuan untuk bisa mengembangkan wawasan pengetahuan, pola pikir kritis, melatih kemampuan menganalisis serta mengolah data sebagai suatu kemampuan khusus bagi calon sarjana. Menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka di dalam merampungkan seluruh proses penulisan ini berbagai pihak turut memberi kontribusi yang sangat berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya, terutama kepada:

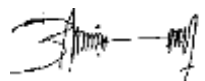
1. Prof. Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;
2. Faisal Affandi, M.E.I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;
3. Paisal Rahmat, M.E, selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal;
4. Paisal Rahmat M.E, dan juga Ibu Nurintan Siregar, M.E, selaku pembimbing penulis, yang di sela-sela kesibukannya dalam menjalankan tugas-tugas masih

5. bersedia menyempatkan diri untuk bisa memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
6. Bapak/Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, khususnya Dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan arahan selama menjalani proses perkuliahan;
7. Bapak Kepala Desa Hutabargot Setia serta seluruh jajaran pemerintahan desa, dan seluruh warga yang terlibat dan telah membantu penulisan skripsi ini;
8. Ayahanda Burhanuddin Nasution dan Ibunda Sakdiah boru hasibuan, yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang dan tanpa lelah berdoa bagi keberhasilan anaknya untuk masa hari depan yang lebih baik;
9. Kepada Abangda dan kakanda tercinta yang sangat baik dan juga setia, Marataon Nasution dan isteri kak Enni Suraidah Rangkuti; Nurhanida Nasution dan suami abang Erwin Nasution, selanjutnya abang Martua Nasution; abang Marlian Arif Nasution dan Isteri kak Nurhayati Ritonga; Kakak Nita Wida Sari Nasution dan suami abang Rahmat Subandri Lubis, mereka inilah sesungguhnya yang menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta dengan setia, memberi semangat dan dorongan juga selalu menjadi pendamping dalam suka dan duka. Penulis memanjatkan doa semoga selalu dalam lindungan dan dalam keberkahan Allah Yang Maha Kuasa.
10. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman satu angkatan (2021), terkhusus lokal A, insyaallah semua sukses dalam karirnya.

Semoga Allah Swt akan membalas dengan berlipat ganda semua kebaikan, bantuan dan ketulusan hati dari Bapak/Ibu/Tuan/Puan, Aamiin.

*“Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq” Wassalamu’alaikum, Wr.wb*

Panyabungan, 11 September 2025



Mar'ie Muhammad  
NIM. 21080025

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Penjelasan Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
A. Kajian Teori .....	10
1. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik .....	10
2. Akuntabilitas Publik dan Relevansinya dengan Pengelolaan Dana Desa.....	15
3. Ekonomi Syariah sebagai Pendekatan dalam Pengelolaan Dana Desa.....	17
4. Konsep <i>Good Governance</i> dalam Perspektif Islam .....	23
5. Integrasi Transparansi dan Akuntabilitas ke dalam Ekonomi Syariah.....	26
B. Hasil Penelitian Yang Relevan .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Sumber Data Penelitian .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
E. Teknik Keabsahan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Data .....	40
1. Temuan Umum Penelitian .....	40
a. Identitas Lokasi Penelitian (Geografis & Administratif) .....	40
b. Demografi dan Kependudukan.....	41
c. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	43
d. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Hutabargot Setia .....	45
2. Temuan Khusus Penelitian .....	46
a. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Huta-bargot Setia Mandailing Natal. ....	46
1) Transparansi Pengelolaan Dana Desa .....	46
2) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	58
b. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah untuk Mengoptimal- kan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal.....	64
1) Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Transparansi Dana Desa .....	66
2) Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Akuntabilitas Dana Desa .....	69
3) Potensi Perubahan Pengelolaan Dana Desa (Transparansi dan Akuntabilitas) setelah Diintegrasikan dengan Prinsip Ekonomi Syariah.....	71
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal .....	73
2. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah untuk Mengoptimalkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sinergi Prinsip Ekonomi Syariah dan <i>Good Governance</i> .....	22
Tabel 3.1 Waktu ( <i>Time Table</i> ) Penelitian .....	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Hutabargot Setia .....	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin .....	42
Tabel 4.3 Data Observasi Transparansi Melalui Pemasangan Baliho .....	46
Tabel 4.4 Data Observasi Transparansi Melalui Musyawarah Desa .....	47
Tabel 4.5 Data Observasi Transparansi Melalui Pelaporan Berkala.....	47
Tabel 4.6 Data Observasi Bentuk Akuntabilitas Administratif .....	58
Tabel 4.7 Identifikasi Gap antara Kondisi Eksisting dengan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Tata Kelola Dana Desa di Desa Hutabargot Setia .....	65
Tabel 4.8 Potensi Perubahan Pengelolaan Dana Desa di Desa Huta Bargot Setia Setelah Diintegrasikan dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah .....	72

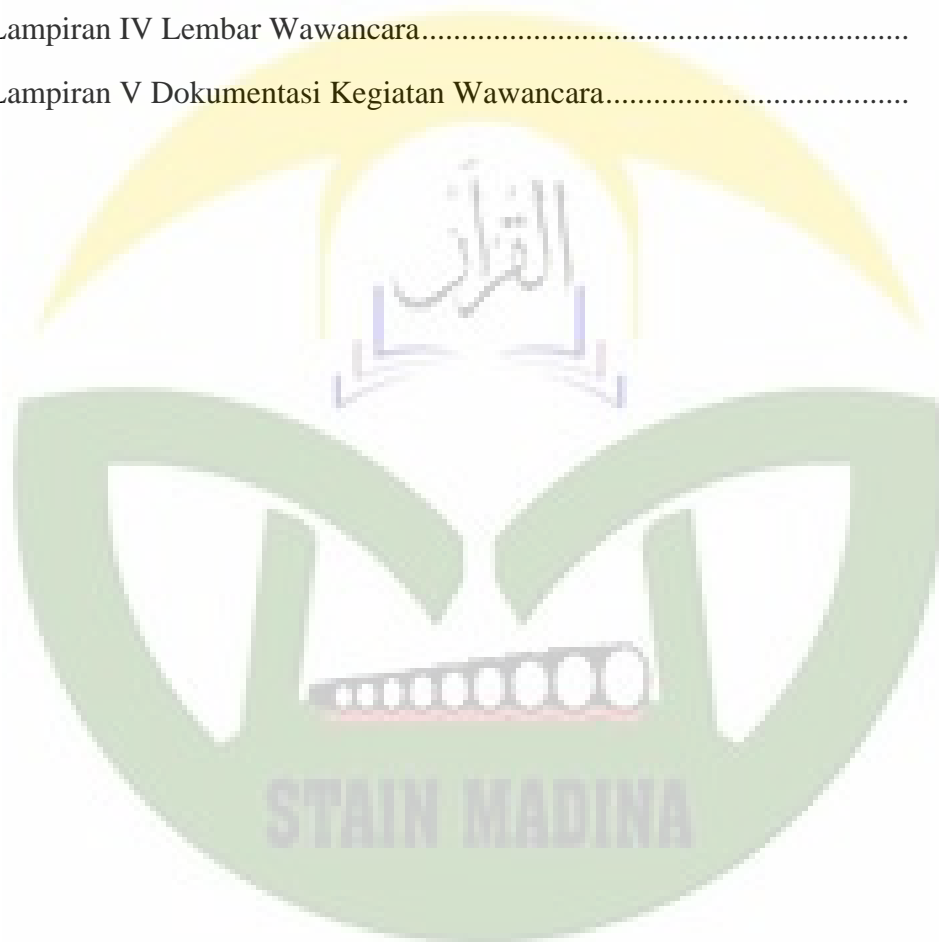
## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Data Transparansi Melalui Pemasangan Baliho.....	55
Gambar 4.2 Data Transparansi Melalui Musyawarah Desa.....	56
Gambar 4.3 Data Transparansi Melalui Pelaporan Berkala.....	56
Gambar 4.4 RKPDes dan LPJ Dana Desa Hutabargot Setia .....	63
Gambar 4.5 Program Pembangunan Desa Hutabargot Setia .....	63
Gambar 4.6 Model Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Transparansi Dana Desa.....	66
Gambar 4.7 Model Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Akuntabilitas Dana Desa.....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Izin Penelitian .....	86
Lampiran II Surat Balasan Izin Penelitian .....	87
Lampiran III Lembar Observasi.....	88
Lampiran IV Lembar Wawancara.....	89
Lampiran V Dokumentasi Kegiatan Wawancara.....	91



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utamanya di dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan otonomi dan juga kewenangan besar kepada desa dalam mengelola potensi dan sumber dayanya secara mandiri. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Di sisi lain, dana desa juga menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah desa di dalam mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya ini benar-benar dirasakan oleh seluruh warga desa (Fadilah, 2019).

Tetapi kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya berbagai hambatan dan juga persoalan dalam pengelolaan dana desa, termasuk di Desa Hutabargot Setia, Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi fokus kajian ini. Desa Hutabargot Setia merupakan salah satu desa di wilayah Mandailing Natal, memiliki karakteristik sosial budaya yang kuat dan didominasi oleh mayoritas penduduk Muslim, sehingga pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi persoalan teknis administrasi, tetapi juga menyangkut aspek moral dan etika yang berakar pada nilai-nilai lokal dan nilai agama. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya jarak struktural dan kultural antara pemerintah desa dan juga masyarakat yang semestinya menjadi subjek dalam proses pembangunan.

Transparansi yang idealnya akan menjadi fondasi di dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran, dalam praktiknya terkesan hanya menjadi formalitas administratif yang tidak bermakna secara substantif. Akuntabilitas pun menjadi tumpul, karena laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun oleh aparat desa tidak pernah diuji melalui forum publik ataupun tidak disosialisasikan secara luas kepada masyarakat desa (Kholid, 2019).

Dana desa yang sejatinya ini dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, justru berisiko menjadi alat akumulasi kekuasaan dan memperdalam ketimpangan sosial apabila tidak dikelola secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam menganalisis persoalan ini, termasuk dengan memasukkan perspektif etika dan juga moral ke dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di Desa Hutabargot Setia menguatkan gambaran tersebut dengan ciri khas lokal yang menuntut perhatian khusus. Dalam konteks sosial budaya masyarakat Mandailing Natal yang sarat dengan tradisi kekerabatan dan juga norma religius Islam, pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan akan merusak fondasi kepercayaan sosial yang menjadi modal utama bagi keberlangsungan pembangunan dan kohesi komunitas (D. M. Sari, 2021).

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan antara idealitas tersebut dengan praktik yang berjalan. Penelitian terdahulu di wilayah Sumatera Utara juga mengindikasikan bahwa ketimpangan informasi dan lemahnya akuntabilitas finansial berpotensi menciptakan disfungsi sosial seperti meningkatnya konflik antar kelompok masyarakat, menurunnya partisipasi warga di dalam musyawarah desa, dan melemahnya peranan lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fenomena ini tidak terlepas dari budaya birokrasi yang masih didominasi pola-pola paternalistik, di mana kepala desa dan aparatnya memiliki kuasa yang sangat sentralistik dan cenderung mengedepankan kepentingan kelompoknya sendiri. Dalam hal ini, transparansi bukan hanya soal menyajikan laporan keuangan secara terbuka, tetapi juga ini soal pemberdayaan masyarakat agar memiliki kapasitas dan akses untuk melakukan kontrol sosial secara efektif (Huda, N., 2021).

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat ataupun perangkat desa menunjukkan bahwa lebih dari 70% warga mengaku belum pernah mendapatkan informasi rinci terkait penggunaan dana desa di dalam lima tahun terakhir. Kesenjangan ini menjadi potensi bahaya bagi keberlanjutan program pembangunan yang bergantung pada partisipasi dan dukungan masyarakat. Selain itu, minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tata kelola

berbasis amanah juga berkontribusi pada kurang optimalnya pengelolaan dana desa. Kondisi ini menuntut adanya upaya strategis tidak hanya dari segi teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga dari aspek pendidikan nilai dan juga budaya organisasi yang mampu menanamkan kesadaran spiritual dan etika yang tinggi. Oleh sebab itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif ekonomi syariah dengan pengelolaan keuangan desa menjadi relevan dan mendesak (Luthfi, n.d.).

Dengan mengadopsi prinsip dan nilai syariah seperti kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*'adl*), dan juga tanggung jawab (*amanah*), pengelolaan dana desa di Hutabargot Setia dapat direvitalisasi sehingga tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga membangun *trust* (kepercayaan) dan sosial capital (modal sosial) yang kuat. Model tata kelola yang berlandaskan prinsip syariah ini dapat menjadi solusi untuk membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang holistik, yang mengikat aparat desa secara moral dan juga spiritual agar senantiasa menjaga amanah dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat menciptakan iklim pemerintahan desa yang sehat, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga tujuan pembangunan berkeadilan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dapat tercapai (Rosyan, 2018).

Selain persoalan nilai dan etika, tantangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Hutabargot Setia juga sangat dipengaruhi oleh kondisi kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Banyak perangkat desa yang masih terbatas dalam pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang transparan dan juga akuntabel, termasuk penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan konteks lokal. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa lebih dari 60% aparatur desa di Hutabargot Setia belum mendapatkan pelatihan memadai terkait manajemen keuangan desa dan mekanisme pelaporan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengelolaan administrasi dan juga dokumentasi yang berpotensi menyebabkan kesalahan atau bahkan penyalahgunaan dana desa. Keterbatasan SDM ini diperparah dengan minimnya akses terhadap pendampingan teknis dari lembaga swadaya masyarakat yang mengkhususkan diri pada pengelolaan dana desa, khususnya pengelolaan dana desa yang berbasis syariah.

Desa Hutabargot Setia juga tidak terlepas dari tekanan politik yang berasal dari para elite lokal yang terkadang memanfaatkan posisi dan juga pengaruhnya untuk mengintervensi proses penganggaran ataupun pelaksanaan kegiatan. Data dari hasil pemantauan oleh lembaga swadaya masyarakat setempat menunjukkan bahwa hampir 30% program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa pernah mengalami perubahan alokasi tanpa melibatkan musyawarah desa seluruh elemen masyarakat. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya mengurangi rasa keadilan dan kepercayaan warga, tapi juga menghambat pengembangan program sesuai dengan kebutuhan riil di masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas SDM, baik dari sisi teknis maupun juga integritas moral, akan menjadi kunci utama untuk memperbaiki tata kelola dana desa di Hutabargot Setia (Katayu, 2024).

Untuk bisa menjawab berbagai persoalan tersebut, pengintegrasian prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana desa menjadi pilihan strategis yang tidak hanya menawarkan solusi teknis, tetapi juga menjawab kebutuhan etis dan kultural masyarakat. Ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, memiliki nilai-nilai yang sangat sejalan dengan tradisi dan norma agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Hutabargot Setia. Dalam konteks ini, penerapan mekanisme pengelolaan dana desa yang berprinsip syariah akan dapat memperkuat tata kelola melalui penguatan aspek amanah, musyawarah, dan transparansi yang bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab moral semua pihak. Konsep pengelolaan dana desa yang berlandaskan ekonomi syariah tidak hanya akan memperkuat kontrol sosial dari masyarakat, tetapi juga menjadikan aparat desa sebagai pelayan yang benar-benar mengemban amanah untuk kesejahteraan bersama (Anggun Puji Nur Fadila & Dyah Pravitasari, 2025).

penerapan ekonomi syariah juga membuka ruang bagi inovasi mekanisme pengawasan yang lebih efektif dan partisipatif. Misalnya, penggunaan prinsip *wakalah* (kepercayaan) di dalam delegasi pengelolaan keuangan kepada lembaga atau individu yang kompeten dan terpercaya, serta prinsip *hisbah* (pengawasan) yang akan mendorong masyarakat untuk aktif di dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dari desa-desa yang telah menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan dana menunjukkan

peningkatan signifikan dalam hal partisipasi masyarakat dan penurunan kasus penyalahgunaan dana. Misalnya, Studi di beberapa desa di Jawa Barat, mencatat bahwa desa yang telah mengadopsi sistem pengelolaan syariah ini mengalami pengurangan sejumlah 40% dalam laporan penyimpangan dana desa dibandingkan dengan desa yang tetap menggunakan sistem konvensional. Dengan demikian, pendekatan ekonomi syariah bukan hanya sebuah pilihan normatif, tapi juga solusi praktis yang mampu mengatasi persoalan dana desa (Luthfi, n.d.).

Melalui penguatan nilai-nilai moral dan juga transparansi yang ditanamkan secara sistematis, Desa Hutabargot Setia dapat mewujudkan tata kelola dana desa yang berkelanjutan, demokratis, dan berkeadilan sosial. Penelitian ini hadir untuk dapat mengisi kekosongan kajian yang secara mendalam mengaitkan antara aspek transparansi dan akuntabilitas dengan prinsip nilai-nilai ekonomi syariah, suatu pendekatan yang masih relatif jarang diangkat dalam konteks pengelolaan dana desa di Indonesia, dan khususnya di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, di mana tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab semakin meningkat. Kesadaran masyarakat terhadap haknya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang pengelolaan dana publik, termasuk dana desa, menuntut adanya paradigma baru dalam tata kelola yang mengedepankan keterbukaan dan partisipasi aktif warga.

Permasalahan utama transparansi dan akuntabilitas Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal, terlihat dari berbagai hal praktik yang kurang mencerminkan keterbukaan pengelolaan anggaran. Publikasi laporan Dana Desa umumnya hanya ditampilkan sebentar melalui spanduk yang dipasang beberapa hari, sehingga informasi yang seharusnya akan dapat diakses oleh publik secara berkelanjutan justru bersifat sementara dan mudah hilang. Selain itu, laporan lengkap mengenai penggunaan dana hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu, sehingga menimbulkan kesan eksklusif dan menutup kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui secara detail terkait realisasi anggaran. Lebih jauh lagi, forum pertanggungjawaban publik seperti musyawarah desa jarang dilaksanakan secara rutin, bahkan ketika dilakukan cenderung bersifat formalitas tanpa memberi ruang

partisipasi yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa belum berjalan optimal, sehingga akan dapat menimbulkan kesenjangan informasi dan juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.

Berdasarkan seluruh uraian data di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan normatif dan juga praktik yang akan dapat mendorong optimalisasi pengelolaan dana desa menjadi lebih berintegritas. Maka peneliti pun mengambil judul **“Optimalisasi Transparansi dan Akuntabilita Dana Desa Melalui Pendekatan Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan seluruh rangkaian data di dalam latar belakang masalah dan temuan penelitian terdahulu yang menyebut perlunya referensi dalam memperkuat sinergi antara aspek religius, sosial, dan ekonomi dalam membangun desa yang mandiri dan berkeadilan. Maka, fokus rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal?
2. Bagaimana Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dapat Diterapkan untuk Mengoptimalkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak diperoleh melalui kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam terkait perihal berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal.
2. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah untuk Mengoptimalkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Hutabargot Setia Mandailing Natal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pengelolaan Dana Desa merupakan instrumen strategis dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Namun efektivitasnya amat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan tata kelola pemerintahan desa. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar pengembangan konsep tata kelola dana desa yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah seperti Amanah, Keadilan, Hisbah, dan Musyawarah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dan juga rekomendasi bagi:

- a. Pemerintah Desa, di dalam merancang sistem pengelolaan dana desa yang lebih transparan dan akuntabel sesuai nilai-nilai Islam.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Masyarakat, untuk meningkatkan partisipasi dan pengawasan berbasis prinsip hisbah (pengawasan sosial).
- c. Tokoh agama dan ulama Lokal, untuk berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai etika syariah dalam tata kelola publik desa.
- d. Peneliti, penelitian ini bisa menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman teoretis dan praktis mengenai penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam tata kelola keuangan publik di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya pengalaman di lapangan dalam menggali data kualitatif secara mendalam, khususnya dalam konteks sosial-religius masyarakat desa. Melalui studi kasus di Desa Hutabargot Setia, peneliti dapat mengembangkan kemampuan analitis dan kritis terhadap dinamika pengelolaan dana desa yang dihadapkan pada tantangan transparansi dan juga akuntabilitas, serta memperoleh wawasan baru mengenai peranan nilai-nilai Islam di dalam mendorong tata kelola yang berintegritas.

## E. Penjelasan Istilah

Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di tingkat desa, konsep transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar penting yang tidak dapat diabaikan. Seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap pengelolaan keuangan publik yang berkeadilan dan juga berintegritas maka muncul kebutuhan untuk mengeksplorasi pendekatan-pendekatan alternatif yang dapat memperkuat nilai-nilai tersebut, salah satunya adalah melalui pendekatan ekonomi syariah. Untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap ruang lingkup kajian, berikut adalah penjelasan istilah-istilah kunci yang terkandung dalam judul penelitian ini:

1. **Optimalisasi.** Maksudnya adalah Serangkaian upaya sistematis untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa sehingga transparansi dan akuntabilitas tidak hanya memenuhi standar administratif (Lubis, 2021).
2. **Transparansi.** Transparansi ini adalah merujuk pada keterbukaan dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan penggunaan dana desa. Ini mencakup penyampaian informasi secara jelas, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat. Dalam konteks riset ini, transparansi bertujuan untuk dapat memastikan bahwa masyarakat mengetahui bagaimana dana ini digunakan dan untuk apa, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan (Fadilah, 2019).
3. **Akuntabilitas.** Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan juga pihak-pihak yang berwenang. Ini melibatkan pelaporan hasil penggunaan dana secara jujur dan tepat waktu, serta adanya mekanisme evaluasi dan pengawasan (Kholid, 2019).
4. **Dana Desa.** Dana desa ini adalah alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang diberikan kepada desa untuk dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (D. M. Sari, 2021).
5. **Pendekatan Ekonomi Syariah.** Pendekatan ekonomi syariah ini mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain keadilan, amanah, musyawarah, larangan riba dan *gharar* (ketidakjelasan), serta penggunaan dana untuk kemaslahatan umat. Dalam konteks pengelolaan dana desa, pendekatan ini akan menekankan pengelolaan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemanfaatan sosial.

6. Studi Kasus. Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena tertentu secara mendalam dalam konteks nyata. Dalam judul ini, studi kasus akan dilakukan di Desa Hutabargot Setia, sebagai lokasi spesifik untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dana desa melalui pendekatan ekonomi syariah (Silalahi, 2012).
7. Desa Hutabargot Setia, Mandailing Natal. Desa Hutabargot Setia adalah desa yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Wilayah ini dipilih sebagai objek studi karena memiliki karakteristik sosial, budaya, dan keagamaan yang kuat, sehingga relevan dalam mengkaji implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam tata kelola pemerintahan desa.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan disusun secara sistematis untuk memastikan alur penelitian tersaji dengan runtut dan juga mudah dipahami. Oleh karena itu, maka sistematika pembahasan di dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, **BAB I** berisi Pendahuluan yang akan terdiri dari; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, dan juga Sistematika Pembahasan.

Kedua, **BAB II** berisi tentang Kajian Teori yang terdiri; (1) Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik; (2) Akuntabilitas Publik dan Relevansinya dengan Pengelolaan Dana Desa; (3) Ekonomi Syariah Sebagai Pendekatan dalam Pengelolaan Dana Desa; (4) Konsep *Good Governance* dalam Konsep Islam; (5) Integrasi Transparansi dan Akuntabilitas ke dalam Ekonomi Syariah, dan Hasil Penelitian yang Relevan.

Ketiga, **BAB III** berisi tentang Metode Penelitian yang terdiri dari; Jenis Penelitian, Lokasi/Waktu Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Keabsahan Data, dan juga Teknik Analisis Data.

Keempat, **BAB IV** berisi tentang perihal Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari; Deskripsi Data (temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian), dan serta Pembahasan Hasil Penelitian.

Kelima, **BAB V** berisi terkait Penutup yang akan terdiri dari; Kesimpulan dan Saran terhadap kegiatan penelitian.